



Original Article

Evaluasi terhadap Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Studi di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu

Teddy Surya Rahmadi^{1✉}, Adityo Pratikno Ramadhan², Gushevinalti³

^{1,2,3} Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Indonesia

Korespondensi Email: teddysurya6698@gmail.com[✉], adityo.ramadhan@unib.ac.id, gushevinalti@unib.ac.id

Abstrak:

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dibuat untuk menunjang seluruh kebutuhan dari pemerintah daerah salah satunya dalam penyusunan RKPD. Penggunaan dari sistem ini tentunya membawa banyak perubahan yang awalnya dilakukan secara manual menjadi serba digital. Oleh karena itu, peralihan sistem ini memerlukan evaluasi secara menyeluruh agar kegunaan dari SIPD sesuai dengan kebutuhan secara aktual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga berfokus pada pendekatan pemaparan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang RKPD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Bengkulu Tahun 2024 yang menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield. Menggunakan model ini menjawab kendala, ketidaksesuaian, dan hambatan dari SIPD sehingga dapat ditingkatkan secara berkala dan menunjang kinerja dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Kata kunci: SIPD, Pemerintah Daerah, RKPD, dan Evaluasi

Submitted	: 03 February 2026
Revised	: 06 February 2026
Acceptance	: 19 February 2026
Publish Online	: 20 February 2026

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan otonom untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik dan potensi wilayahnya. Desentralisasi ini mendorong daerah menjadi aktor utama dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat ([Riyadi & Bratakusumah, 2004](#); [Suriadi et al., 2024](#)).

Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui dokumen yang terintegrasi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiga dokumen ini memiliki keterkaitan hierarkis dan menjamin kesinambungan pembangunan daerah ([Mustanir et al., 2023](#)). RKPD sebagai dokumen tahunan memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan penganggaran tahunan melalui APBD. RKPD juga menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ([Kementerian Dalam Negeri, 2017](#)).

Secara substantif, RKPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menyelaraskan kebijakan lintas sektor serta lintas tingkat pemerintahan ([Mustanir et al., 2023](#)). RKPD memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan perangkat daerah, serta target kinerja yang terukur. Oleh karena itu, kualitas RKPD sangat menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD yang baik harus disusun secara metodis, berbasis data akurat, partisipatif, dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat ([Mandraguna et al., 2024](#); [Wurara et al., 2024](#)).

Proses penyusunan RKPD merupakan bagian dari siklus perencanaan daerah yang diawali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kota. Tahapan ini dilanjutkan dengan forum perangkat daerah serta proses sinkronisasi antara pendekatan partisipatif dan teknokratis ([Romadona & Afandi, 2022](#)). Idealnya, proses tersebut menghasilkan dokumen yang sistematis, integratif, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilan penyusunan RKPD sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, ketersediaan data yang mutakhir, serta dukungan sistem informasi yang memadai ([Jacob, 2024](#)).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem digital berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara terintegrasi. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejak tahun anggaran 2021, penggunaan SIPD menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah ([Iqbal et al., 2022](#)).

SIPD berfungsi sebagai platform terintegrasi yang mengelola data pembangunan dan keuangan daerah dalam satu basis data nasional. Sistem ini memungkinkan integrasi perencanaan secara horizontal antar-OPD dan vertikal antara pusat dan daerah ([Adisi & Sadad, 2022](#)). Salah satu modul terpenting dalam SIPD adalah modul perencanaan, tempat dokumen RKPD disusun secara digital,

mulai dari penginputan isu strategis, prioritas pembangunan, program dan kegiatan, hingga indikator kinerja ([Sudianing & Seputra, 2019](#)). Keunggulan SIPD terletak pada pendekatan berbasis data dan sistem yang dapat meminimalkan tumpang tindih perencanaan, meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi ([Afifah et al., 2023](#)).

Di Kota Bengkulu, SIPD telah diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan RKPD dan meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan ([Saputra et al., 2025](#); [Mandraguna et al., 2024](#)). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya keterlambatan penginputan RKPD ke dalam SIPD yang tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Data Bappeda Kota Bengkulu (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2022–2024 beberapa tahapan penginputan, seperti rancangan awal dan rancangan akhir, sering mengalami keterlambatan hingga satu sampai dua minggu dari jadwal normatif. Keterlambatan ini berpotensi berdampak pada keterlambatan penyusunan APBD. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan pemahaman operator terhadap mekanisme SIPD, seringnya pergantian operator, serta belum tersedianya Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Beberapa OPD yang sering mengalami kendala antara lain Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Sekretariat Daerah. Permasalahan utama meliputi ketidaksesuaian atau ketiadaan item SSH dalam sistem serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Pemilihan OPD tersebut sebagai unit analisis dinilai representatif karena mencerminkan variasi kendala teknis dan substantif dalam implementasi kebijakan, sebagaimana disarankan dalam studi administrasi publik bahwa relevansi fungsional dan tingkat urgensi masalah harus menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi kebijakan ([Riyadi & Bratakusumah, 2004](#)).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan data, dan koordinasi antar-OPD. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi SIPD dalam penyusunan RKPD guna menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu pendekatan evaluasi yang relevan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985). Model ini menekankan evaluasi secara komprehensif, tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada konteks kebijakan, ketersediaan input, proses pelaksanaan, dan produk yang dihasilkan. Dalam konteks RKPD berbasis SIPD, evaluasi konteks mencakup kesesuaian kebijakan dan kebutuhan daerah; evaluasi input menilai sumber daya manusia, infrastruktur, dan data; evaluasi proses meninjau mekanisme penginputan dan koordinasi; sedangkan evaluasi produk menilai kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan.

Melalui pendekatan CIPP, penelitian dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi SIPD secara sistematis dan objektif. Evaluasi ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,

serta memastikan bahwa RKPD benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pola pikir induktif yang bertujuan menilai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2024. Penelitian dipahami sebagai proses ilmiah yang sistematis, kritis, dan empiris untuk memahami fenomena berdasarkan teori dan data lapangan ([Sugiyono, 2008](#)). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual secara komprehensif ([Sarwono, 2006](#)) serta memahami pengalaman dan persepsi pelaksana kebijakan ([Satibi, 2017](#)). Pola induktif memungkinkan penarikan kesimpulan umum berdasarkan fakta empiris di lapangan ([Raco, 2010](#)). Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985) untuk menilai kesesuaian konteks kebijakan, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, serta kualitas hasil yang dicapai.

Fokus penelitian mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Instrumen utama adalah peneliti sendiri dengan dukungan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi ([Sugiyono, 2008](#)). Informan dipilih melalui purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi SIPD hingga mencapai titik jenuh data ([Lincoln & Guba dalam Sugiyono, 2008](#); [Yakin, 2023](#)). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual ([Raco, 2010](#)). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu ([Sugiyono, 2008](#)). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan ([Sarwono, 2006](#)), sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas, efisiensi, dan kualitas implementasi SIPD dalam mendukung penyusunan RKPD Kota Bengkulu Tahun 2024.

Hasil Penelitian

1. Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan 7 orang informan yang berasal dari empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Bappeda Kota Bengkulu. Dari Sekretariat Daerah terdapat dua informan, yaitu Kasubbag Penyusunan Program dan Operator SIPD. Komposisi yang sama juga berasal dari Sekretariat DPRD serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, masing-masing terdiri atas satu Kasubbag Penyusunan Program dan satu Operator SIPD. Sementara itu, dari Bappeda Kota Bengkulu terdapat satu informan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Keterlibatan para pejabat tersebut relevan dengan fokus penelitian karena mereka memiliki peran langsung dalam proses penyusunan serta penginputan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan melibatkan unsur perencana dan operator teknis dari beberapa OPD, data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan SIPD di lingkungan Pemerintah Kota

Bengkulu.

Berdasarkan data demografi, dari tujuh narasumber terdapat empat laki-laki dan tiga perempuan. Dominasi responden laki-laki menunjukkan komposisi yang relatif seimbang, meskipun masih lebih banyak laki-laki dalam jabatan yang diwawancarai. Dari segi usia, rentang umur informan berada antara 34 hingga 57 tahun, dengan usia termuda 34 tahun dan tertua 57 tahun. Rentang usia tersebut menunjukkan bahwa seluruh informan berada pada kelompok usia produktif dan memiliki pengalaman birokrasi yang cukup matang. Sebagian besar berada dalam kategori generasi Y dan generasi X akhir, yang secara umum telah terbiasa dengan proses transisi dari sistem manual menuju sistem digital seperti SIPD.

Keberagaman usia, jenis kelamin, serta latar jabatan/peran ini memperkuat validitas data penelitian, karena informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu perspektif, melainkan mencerminkan pandangan perencanaan kebijakan sekaligus pelaksana teknis penginputan data. Dengan demikian, hasil wawancara semi-terstruktur yang dilakukan terhadap ketujuh informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi dan kendala penggunaan SIPD dalam penyusunan RKPD di Kota Bengkulu.

2. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini menjadi bagian penting dari penelitian yang memuat hasil dan pembahasan penelitian terkait evaluasi dari penggunaan SIPD dalam penyusunan RKPD Kota Bengkulu. Adanya sistem tersebut tidak hanya sebatas pada fungsi administratif, tetapi menjadi strategi jangka panjang. Adapun sistem tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan dari penggunaanya yang disajikan pada gambar di bawah:

Gambar 1 Tampilan Awal SIPD Kota Bengkulu

Gambar 1 menyajikan tampilan awal dari SIPD yang diakses melalui web sehingga memerlukan internet dan perangkat yang memadai. Tampilan awal dari SIPD mengharuskan penggunaanya untuk *login* menggunakan akun yang sudah disediakan.

Gambar 2. Dashboard Utama SIPD Kota Bengkulu

Pada gambar 2 menunjukkan tampilan setelah pengguna berhasil masuk menggunakan akun sehingga muncul *dashboard* utama dari SIPD. *Dashboard* ini berisikan data utama dengan tampilan yang disederhanakan. Sistem ini dirancang untuk menunjang kinerja pemerintah daerah salah satunya dalam perancangan, penganggaran, penatausahaan, bahkan pelaporan keuangan yang terintegrasi.

Evaluasi Penggunaan SIPD dalam Penyusunan RKPD Kota Bengkulu di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana hasil dari penelitian yang membahas terkait Evaluasi Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Studi Di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dan Dinas Perumahan Permukiman Kota Bengkulu menggunakan metode evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, Daniel, dan Anthony J. Shinkfield. Metode evaluasi ini menekankan pada empat elemen evaluasi yakni *context*, *input*, *process*, dan *product*. Fokus utama dari penelitian ini untuk meneliti evaluasi dari penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada beberapa OPD antaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1. Konteks (Context)

Evaluasi konteks dalam model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield menekankan pentingnya analisis kebutuhan, masalah, dan peluang sebagai dasar perumusan kebijakan agar relevan dan rasional. Dalam konteks ini, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada penyusunan RKPD Kota Bengkulu dilatarbelakangi kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Sebelum penggunaan SIPD, penyusunan RKPD menghadapi kendala berupa ketidaksinkronan data, keterlambatan informasi, serta lemahnya integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, urgensi SIPD terletak pada kemampuannya mengintegrasikan Renja PD dengan RKPD secara sistematis dan real-time, sekaligus memperkuat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga efektivitas RKA OPD meningkat.

Hasil wawancara pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa SIPD berperan strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM), memastikan keterkaitan Renja dengan APBD, serta menyediakan tolok ukur kinerja berbasis RKPD. Sistem ini memfasilitasi proses verifikasi oleh Bappeda dan mendukung sinergi program secara terstruktur dalam satu tahun anggaran. Dari aspek kesesuaian, SIPD dinilai cukup memenuhi kebutuhan integrasi data RKPD dan RKA OPD serta pengukuran kinerja dan akurasi anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, kebutuhan pelatihan operator, optimalisasi dashboard evaluasi, serta penyempurnaan fitur validasi. Secara keseluruhan, evaluasi konteks menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kota Bengkulu telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan OPD, meskipun memerlukan peningkatan berkelanjutan agar lebih optimal dan adaptif.

2. Masukan (Input)

Evaluasi masukan dalam model CIPP Evaluation Model menekankan penilaian terhadap strategi, sumber daya, dan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai tujuan. Dalam konteks penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan RKPD di Kota Bengkulu, evaluasi input difokuskan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM), pelatihan, serta sarana prasarana pendukung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman relatif siap mengoperasikan SIPD. Operator secara aktif berkoordinasi dan belajar ke Bappeda, serta mengikuti pelatihan teknis yang membantu percepatan validasi data real-time dan penyelarasan Renja dengan RKPD. Meski demikian, kebutuhan refreshment pelatihan tetap diperlukan, terutama untuk fitur lanjutan dan penyelesaian kendala teknis.

Sebaliknya, Sekretariat DPRD menghadapi keterbatasan SDM karena tingginya beban kerja dan minimnya pegawai yang bersedia menangani perencanaan. Faktor usia operator juga memengaruhi kecepatan adaptasi teknologi sehingga berdampak pada keterlambatan input data. Dari sisi infrastruktur, sebagian OPD telah memiliki perangkat komputer yang memadai, namun kendala utama terletak pada jaringan internet yang lambat dan tidak stabil. Hambatan ini mengurangi optimalisasi fungsi SIPD sebagai sistem berbasis daring dan real-time, bahkan memaksa operator melakukan input data di luar kantor.

Sebagai respons, Bappeda berperan krusial melalui penerbitan surat izin dan penyelenggaraan pelatihan terstruktur bagi operator tiap OPD. Secara keseluruhan, evaluasi input menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, serta dukungan infrastruktur yang memadai guna menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi penyusunan RKPD.

3. Proses (Process)

Evaluasi proses dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Bengkulu dapat dianalisis melalui model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985), evaluasi proses berfokus pada pemantauan pelaksanaan program, konsistensi prosedur, efektivitas pelaksanaan, serta identifikasi kendala untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks peralihan sistem manual ke SIPD yang terintegrasi dan real-time, evaluasi proses menjadi krusial untuk memastikan seluruh tahapan—mulai dari penginputan hingga verifikasi data—berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan

daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala utama dalam proses implementasi SIPD terletak pada aspek sumber daya manusia (SDM). Operator Sekretariat DPRD mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi, terutama karena faktor usia yang memengaruhi adaptasi terhadap teknologi digital. Kesulitan tersebut mencakup kebingungan saat penginputan dan keterbatasan data Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kompetensi teknis dan kesiapan SDM. Oleh karena itu, diperlukan standar kualifikasi operator serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD.

Berbeda dengan operator yang lebih senior, operator dari Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cenderung lebih mudah memahami pengoperasian SIPD, meskipun tetap menghadapi kendala teknis berupa ketidaklengkapan data SSH saat penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Permasalahan ini umumnya diselesaikan melalui koordinasi dengan Bappeda, baik dengan mengirimkan daftar data melalui grup WhatsApp operator SIPD maupun dengan mendatangi Bappeda secara langsung. Meskipun grup komunikasi daring memudahkan pelaporan kendala, respons yang relatif lambat karena banyaknya OPD yang berkoordinasi membuat sebagian operator memilih konsultasi tatap muka agar penyelesaian lebih cepat dan jelas.

Dalam tahapan akhir, Bappeda melakukan verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan yang diinput dengan Renstra OPD serta memastikan anggaran tidak melebihi pagu yang ditetapkan. Setelah dinyatakan sesuai, Renja OPD yang telah diinput dalam SIPD diintegrasikan ke dalam RKPD. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal yang sistematis dan berjenjang, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas sistem tetap sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM dan kelengkapan data pendukung. Dengan demikian, evaluasi proses SIPD tidak hanya menyoroti aspek teknis sistem, tetapi juga pentingnya penguatan kompetensi operator dan optimalisasi koordinasi antarperangkat daerah demi keberhasilan penyusunan RKPD secara digital (Stufflebeam & Shinkfield, 1985).

4. Hasil (Product)

Evaluasi hasil (product) dalam model CIPP yang diperkenalkan oleh Daniel L. Stufflebeam bersama Anthony J. Shinkfield (1985) menekankan pada penilaian terhadap output, dampak, dan efektivitas suatu kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), evaluasi hasil menunjukkan adanya perubahan signifikan dibanding metode manual sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pejabat dan operator di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SIPD dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) hingga 85–90%. Sistem ini mempermudah integrasi dan sinkronisasi data antara Renja, RKPD, dan Renstra, menyediakan dashboard pemantauan progres secara real-time, serta meminimalkan kesalahan manual yang sebelumnya sering terjadi saat menggunakan Microsoft Excel.

Dari sisi teknis, fitur unggulan seperti validasi otomatis, notifikasi kesalahan, ekspor laporan dalam format PDF/Excel, serta kemampuan unggah dokumen secara

langsung meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi data. Pada Sekretariat DPRD, SIPD juga mendukung verifikasi lintas-OPD sehingga memudahkan fungsi pengawasan dewan melalui data yang lebih transparan dan terstandarisasi. Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sistem ini dinilai mampu mengintegrasikan data spasial/GIS, menyediakan histori data hingga tiga tahun, serta membantu perhitungan anggaran secara lebih presisi sehingga dokumen menjadi lebih evidence-based dan feasible. Secara substansial, kualitas dokumen Renja dan RKPD meningkat karena adanya standarisasi template, otomatisasi validasi indikator, serta konsistensi antarbidang yang lebih terjaga. Dokumen yang dihasilkan menjadi lebih akurat, siap audit, transparan, dan mudah ditelusuri (traceable).

Meskipun demikian, evaluasi hasil juga mengidentifikasi sejumlah kendala. Faktor utama adalah ketidakstabilan jaringan internet yang memengaruhi kelancaran penginputan dan sinkronisasi data. Selain itu, pembaruan sistem terkadang menimbulkan gangguan sementara pada data. Keterbatasan kompetensi teknis sebagian operator, terutama yang belum terbiasa dengan sistem digital, juga menjadi tantangan dalam optimalisasi penggunaan SIPD.

Sebagai tindak lanjut, para informan merekomendasikan peningkatan pelatihan rutin minimal dua kali setahun yang dikoordinasikan oleh Bappeda, penyediaan video tutorial pada dashboard, pengembangan aplikasi mobile untuk input lapangan secara real-time, serta penyempurnaan notifikasi error agar lebih informatif. Selain aspek teknis, usulan penerbitan Surat Keputusan (SK) operator disertai pemberian insentif tambahan dinilai penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja, mengingat beban kerja operator cukup kompleks. Dengan demikian, berdasarkan evaluasi hasil, SIPD terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas dokumen perencanaan daerah, meskipun efektivitas optimalnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur jaringan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Kendala dalam Proses Penginputan dan Validasi Data Rencana Kerja Perangkat Daerah ke Dalam SIPD

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah dalam perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kepentingan daerah. Sistem ini dibuat untuk menunjang penyusunan RKPD sehingga tersistematis dan memiliki data yang *real-time*. Selain itu, sistem ini memerlukan pengetahuan dan kompetensi teknis dalam mengoperasikannya sehingga sumber daya manusia berperan besar agar penggunaan SIPD digunakan secara optimal dalam kepentingan pembangunan daerah. Peralihan sistem yang menjadi digital tentunya tidak terlepas dari kendala dan hambatan sebab perlunya penyesuaian baik dalam pengimplementasian maupun faktor lain. Berdasarkan konsep CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam, Daniel, dan Anthony J. Shinkfield dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi terutama selama proses penginputan sampai validasi data ketika menggunakan SIPD.

Pengimplementasian SIPD tentunya memerlukan dasar kebijakan dalam praktiknya sehingga regulasi yang jelas sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, agar tercipta keselarasan dalam proses implementasinya diperlukan koordinasi yang jelas terkait kebijakan pusat dengan regulasi dari pemerintah daerah. Kota Bengkulu yang beralih menggunakan sistem digital dalam penyusunan RKPD memerlukan arahan dari pemerintah pusat sehingga proses implementasi tidak menyebabkan

kebingungan. Akan tetapi, dalam praktiknya kerap terjadi hambatan karena ketidaksesuaian kebijakan yang diterapkan sehingga tidak terdapat standar yang jelas.

Kebijakan yang dibuat harus selaras agar standar operasional yang dijalankan menjadi pedoman pengoperasian SIPD dalam penyusunan RKPD. Tidak hanya sebatas hasil dari penyusunan Renja PD, tetapi operasionalisasi dari SIPD baik pada SDM, sarana dan prasarana, bahkan aspek lain yang diperlukan dalam mengoperasikan SIPD. Ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam menentukan tugas dan tanggung jawab yang mengoperasikan SIPD sehingga implementasi dari SIPD dilakukan dengan pegawai yang tidak sesuai dengan standar seharusnya. Hal ini menjadikan sistem dari SIPD yang awalnya dibuat sebagai instrumen menunjang efisiensi menjadi berdampak sebaliknya.

Sistem SIPD yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi memerlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan pengetahuan menunjang dalam menggunakan SIPD dimulai dari menyiapkan data yang dibutuhkan sampai dengan operasional aplikasi. Penelitian ini menyoroti kendala selama penggunaan SIPD yang memiliki perbedaan pada tingkat kemampuan mengoperasikan aplikasi tersebut. Banyaknya tahapan prosedur dari pengaplikasian SIPD untuk penyusunan RKPD menjadikan operator kesulitan untuk mengingat seluruh tahapan.

SIPD dirancang untuk menunjang proses penyusunan RKPD diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses yang memakan waktu dan memerlukan ketelitian tinggi karena awalnya dilakukan secara manual. Penyusunan secara manual tersebut yang rentan terjadi kesalahan baik pada penginputan maupun validasi data. Hal ini yang menjadi dasar dari adanya sistem untuk memudahkan serangkaian proses penyusunan RKPD. Akan tetapi, peralihan sistem ini memiliki beberapa kendala yang diketahui melalui evaluasi secara mendalam baik dari *input* maupun proses penggunaannya.

Kendala dari penginputan data menggunakan SIPD terletak pada kurang lengkapnya data SSH yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPD. Data-data yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran seperti pulpen dan kebutuhan lainnya yang tidak terdaftar dalam sistem menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama proses penginputan. Hal ini diungkapkan oleh para operator SIPD dari tiap OPD Kota Bengkulu.

Operator SIPD Sekretariat Daerah, Bapak Tomi Julta Putra, ST:

Selama penggunaan aplikasi SIPD ini cukup mudah dipahami walaupun terkadang masih ada beberapa yang sedikit terlupa dalam penginputan seperti cara menginput SSH. Dan juga kendala yang paling sering kami alami Ketika penginputan itu adalah data SSH yang belum tersedia waktu menginput RKA. Misal kami ingin menginput pena yang seharga 3000 tapi terkadang belum ada disistem.

Operator SIPD Sekretariat DPRD, Bapak Sugiman, S.Pd:

Bagi saya penggunaan aplikasi SIPD ini masih suka kebingungan. Dikarenakan umur saya yang sudah mau pensiun sehingga agak sulit memahami penggunaan aplikasi tersebut. Kendala kalau didalam sistem saya masih sering lupa bagaimana cara menginput dan data SSH ada beberapa yang tidak tersedia.

Operator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ibu Fitri Maritha, A.Md:

Aplikasi SIPD bagi saya sangat mudah dipahami, belum ada bagi saya kesusahan selama penginputan. Tapi selalu terkendala Ketika menginput RKA yang dimana data SSH terkadang belum lengkap

Pemaparan dari ketiga operator tersebut memperjelas bahwa kendala utama dari proses penginputan SIPD terletak pada data SSH yang kurang lengkap. Kondisi tersebut tentunya memerlukan tindak lanjut yang jelas agar penggunaan SIPD tetap optimal. Oleh karena itu, kendala dari kurang lengkapnya data SSH ditindaklanjuti dengan mengkoordinasi secara langsung kepada Bappeda. Pihak OPD menginfokan kepada Bappeda dengan menyiapkan daftar dari harga yang belum tercantum dalam sistem agar diperbaharui. Upaya tersebut dilakukan oleh Operator SIPD Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Operator SIPD Sekretariat Daerah, Bapak Tomi Julta Putra, ST:

Kalo terkait masalah SSH yang belum tersedia, biasanya kami mengirimkan file daftar data yang ingin diinput ke Bappeda. Nantinya kami hanya tinggal menunggu informasi dari Bappeda apabila data tersebut sudah mereka masukkan kedalam sistem.

Operator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ibu Fitri Maritha, A.Md:

Kalo kami biasanya langsung mendatangi Bappeda terkait masalah tersebut dengan membawa daftar data-data ssh yang akan kami input. Dan nantinya data yang kami bawa, kami kasih k Bappeda untuk mereka timbulkan ke dalam sistem SIPD.

Dengan memberikan daftar barang yang belum terdaftar di sistem Bappeda selaku koordinator akan memperbarui daftar SSH sehingga dapat digunakan oleh para operator dalam penyusunan anggaran. Selain kendala dari sistem yang memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dari OPD, kendala selama proses penginputan terletak pada SDM yang mengoperasikannya. Salah satu Operator SIPD memiliki keterbatasan pengetahuan dan kompetensi teknis untuk mengoperasikan sistem yang berbasis digital. Hal ini disebabkan faktor usia karena menginjak usia pensiun. Keterbatasan SDM tersebut tentunya menjadi kendala dalam proses penginputan yang memakan waktu karena kurangnya pengetahuan teknis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Operator SIPD Sekretariat DPRD, Bapak Sugiman, S.Pd:

Sangat sering saya kebingungan selama proses input data. Apalagi saya sering berkunjung ke Bappeda hanya untuk minta diajarkan Kembali cara penginputan Renja kedalam sistem SIPD. Contohnya terkadang saya lupa bagaimana menimbulkan tempat untuk menginput angka anggaran dan sering terlupa cara menginput RKA nya nanti.

Permasalahan yang dihadapi oleh salah satu operator SIPD dapat diatasi dengan pelatihan secara berkala dan menyediakan fitur video pedoman sebagai panduan dalam mengoperasikan SIPD. Penggunaan SIPD memiliki prosedur yang kerap terlewati sehingga terjadi kesalahan pada hasil akhir. Dengan video pedoman memberikan arahan bagi operator sehingga tidak harus menghubungi Bappeda sebab cenderung memakan waktu.

Pelatihan yang diberikan oleh Bappeda selaku penanggung jawab utama akan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi operator dalam mengoperasikan SIPD sebab Bappeda yang tidak dapat secara langsung merespons kendala dari OPD. Kondisi tersebut menyebabkan proses penginputan terhambat dan mempengaruhi indikator ketercapaian kinerja dari Pemerintah Daerah. Pelatihan diberikan untuk menunjang kesiapan dari OPD dalam proses peralihan sistem yang awalnya secara manual menjadi digital melalui perangkat komputer. Bappeda yang memiliki keterbatasan waktu dan beban kerja selaku koordinator tidak dapat secara *real-time* menjawab kendala-kendala beban sebab bertanggung jawab kepada seluruh OPD Kota Bengkulu dan kesulitan untuk merespons cepat. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan dengan memanfaatkan fitur grup chat di Aplikasi *Whatsapp*. Kendala-kendala ringan dapat diajukan melalui *Whatsapp* sedangkan kendala berat dikoordinasikan langsung kepada Bappeda. Hal ini diungkapkan melalui wawancara kepada Kasubbag dan Operator dari OPD Sekretariat Daerah.

Kasubbag Perencanaan Sekretariat Daerah, Bapak Yurian Toni, SP:

Selama ini koordinasi dengan Bappeda lancar-lancar saja paling terkadang ada sedikit slow respon mungkin dikarenakan OPD lain juga berkoordinasi dengan Bappeda dengan masalah yang mungkin mereka temui selama penginputan

Operator Sekretariat Daerah, Bapak Tomi Julta Putra, ST:

Kami memiliki grup wa yang isinya operator seluruh OPD dan admin Bappeda. Kalau saya ada kendala di peninputan biasanya saya laporkan saja di grup dan menunggu balasan dari Bappeda

Koordinasi dengan Bappeda tentunya dilakukan oleh seluruh OPD yang menjadi alasan lebih lambannya respons atas kendala yang diberikan oleh Bappeda. Oleh karena itu, ketika kendala berat yang lebih rumit mengharuskan OPD untuk mengkoordinasikan secara langsung. Hal ini paparkan melalui wawancara kepada Operator SIPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ibu Fitri Maritha, A.Md:

Berkoordinasi dengan Bappeda sebenarnya lebih enak secara langsung tetapi kalo menurut saya apabila menemui kendala selamat proses penginputan yang tidak terlalu menyulitkan, saya akan berkoordinasi hanya melalui via wa grup saja.

Proses validasi yang dikoordinasikan dengan Bappeda dipengaruhi dengan kualitas jaringan internet sebagai faktor yang berperan penting. Sistem yang dapat diakses dengan internet menjadikan internet sebagai instrumen inti sehingga diperlukan jaringan internet yang memadai. Gangguan dari internet mempengaruhi proses validasi sehingga tahapan penyetujuan data menjadi tertunda. Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi proses perencanaan dan mempengaruhi kepentingan publik. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber terkait kendala jaringan.

Operator Sekretariat Daerah, Bapak Tomi Julta Putra, ST:

Kondisi sarana prasarana di Sekretariat Daerah cukup memadai dengan komputer spek tinggi. Hanya terkendala sedikit di jaringan internet. Secara keseluruhan, infrastruktur mendukung penginputan Renja.

Operator Sekretariat DPRD, Bapak Sugiman, S. Pd :

Kondisi infrastruktur SIPD lancar dengan laptop operator dilengkapi SSD

cepat dan WiFi stabil. Update sistem otomatis jarang bermasalah, meski restart sesekali diperlukan saat sinkronisasi RKPD. Secara teknis, sangat mendukung dalam penginputan Renja PD kedalam SIPD.

Operator dinas perumahan dan permukiman, Ibu Fitri Maritha, A.Md:

Kalau spesifikasi laptop yang dipergunakan cukup mendukung selama proses penginputan. Tidak ada terjadinya lag ataupun error selama penggunaan laptop tersebut. Tetapi untuk jaringan internet sangat lambat menurut saya, terkadang penginputan sering kami lakukan Ketika dirumah ataupun Ketika sedang berkoordinasi dengan bappeda yang memiliki kecepatan jaringan internet yang lancar.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada tiga operator SIPD dari OPD Kota Bengkulu menunjukan bahwa kendala lain yang dirasakan odalam penggunaan SIPD adalah kualitas dari jaringan internet yang tidak memadai. Jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan sistem tersebut terhambat sehingga mempengaruhi penyusunan RKPD menjadi terlambat. Keterlambatan dari penyusunan RKPD tentunya mempengaruhi realisasi dari perencanaan tersebut sehingga pelaksanaan dari kegiatan tidak sesuai dengan rencana.

Gambar 3. Tampilan SIPD yang Mengalami Keterlambatan

Fungsi dari SIPD dibuat untuk meningkatkan efektivitas serta fleksibilitas pengerjaan Renja PD. Akan tetapi, kendala yang terjadi dilapangan justru menjadikan fungsi SIPD berbanding terbalik dengan tujuan awal sebab proses yang berulang dan terhambat. Selain penurunan efisiensi kerja karena kendala tersebut, kualitas dari perencanaan tentunya terpengaruhi sehingga target ketercapaian mengalami penurunan. Oleh karena itu, hambatan karena data yang belum ada disistem, jaringan yang kurang memadai, serta SDM yang kurang mempunyai tidak hanya mempengaruhi produktivitas dari kinerja perangkat daerah, tetapi akurasi dari dokumen yang dihasilkan.

Gambar 4. Perwal RKPD Kota Bengkulu

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa keterlambatan dari penyusunan RKPD yang menggunakan SIPD berpengaruh besar terhadap perencanaan kebijakan dan kegiatan dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Hal ini menjadikan fungsi penting dari SIPD tidak hanya sebatas administratif, tetapi strategi jangka panjang yang menunjang pembangunan, pengembangan, serta kesejahteraan dari masyarakat dari daerah tersebut. Oleh karena itu, dengan dilakukan evaluasi secara menyeluruh menjadi tindak lanjut dalam membenahi sistem dan mempengaruhi kinerja menjadi lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Evaluasi Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Studi Di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dan Dinas Perumahan Permukiman Kota Bengkulu, dapat diketahui beberapa kesimpulan, antaranya:

1. Penggunaan SIPD dalam penyusunan RKPD dapat dievaluasi dengan menggunakan konsep CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Penggunaan SIPD dalam perencanaan RKPD menjadi instrumen yang meningkatkan produktivitas dan kinerja sehingga tidak hanya sebagai fungsi administratif. Oleh karena itu, SIPD menciptakan mekanisme kerja yang terstruktur dan terintegrasi sehingga penggunaan dari SIPD harus selaras dengan kebutuhan agar hasil yang didapat maksimal. Perlunya kesiapan dari sumber daya, sarana dan prasarana, serta penyesuaian sistem dengan kondisi aktual.
2. Kendala dari penggunaan SIPD dalam penyusunan RKPD dari tiap OPD kurang sesuainya sistem dengan kebutuhan dari OPD, SDM yang mengoperasikannya kurang kompetensi yang dibutuhkan sehingga memerlukan pelatihan lebih lanjut, serta kendala internet yang membuat penggunaan SIPD tidak dapat optimal karena prinsip efisiensi tidak terpenuhi secara maksimal.

Daftar Pustaka

Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal*

- Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164.
<https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>
- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 171.
<https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Bappenas. (2021). *Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kementerian PPN.
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(April), 62–79.
- Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 173.
<https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.11192>
- Jacob, J. (2024). *Buku Perencanaan Pembangunan* (Issue July).
- Kartasaswita, G. (1997). *Administrasi pembangunan : perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*. LP3ES.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Mandraguna, Y., Febriawati, H., Afriyanto, Yanuarti, R., Fatmawati, T., & Angraini, W. (2024). Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Proses Perencanaan Di Skpd Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Mitra Rafflesia*, 16(Juli), 1–10.
- Mustanir, A., Kundhani, E. Y., Mursak, Guampe, F. A., Sari, R. M., Prasetyo, A., Boari, Y., Permatasari, C., Amane, A. P. O., Fitrianto, M. R., & Asasandi, I. G. N. A. (2023). *Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep Dan Prakteknya)* (A. Hendrayady (ed.); Issue Agustus). Media Sains Indonesia.
- Nainggolan, L. E., Johanis M, A. R., Hudrasyah, F. H., Abdullah, S., Patiung, M., Pratiwi, I. I., Towalu, H., & Purba, S. (2023). Perencanaan Pembangunan. In M. J. F. Sirait (Ed.), *Yayasan Kita Menulis* (Issue 1). Yayasan Kita Menulis.
<https://doi.org/10.51826/fokus.v2i1i.737>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Patarai, M. . (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. De la Macc.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation* (4th ed.). SAGE Publication.
https://archive.org/details/utilizationfocus0000patt_04ed
- Pemerintahan Pusat. (1999). *Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintahan Pusat. (2004). *UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
[http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_o.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_o.pdf)
- Pemerintahan Pusat. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4820>
- Pemerintahan Pusat. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah*.
- Putri, R. K. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(4), 1–24. <https://www.mendeley.com/catalogue/7990b5ea-6fa9-39dd-96b7-b5bda97d73fc/>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Romadona, R. A., & Afandi, M. N. (2022). Analisis Sistematis Dan Konten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Perubahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sukabumi. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdikan.v3i1.31>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A Systematic Approach 8 ed* (Vol. 1). SAGE Publication.
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4(2), 95–119.
- Santoso, P. (2010). *Analisis Kebijakan Publik* (U. Parlindungan (ed.)). Research Center for Politics and Government.
- Saputra, Y., Kusuma, A. R., & Utomo, H. S. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang. *Jurnal Paradigma*, 14(1), 15–29.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Satibi, I. (2017). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Lemlit Unpas Press.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1985). Systematic Evaluation. In *Systematic Evaluation* (3rd ed.). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-5656-8>
- Sudaning, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 112–133. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/284/281>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Manage. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1), 1–16. <http://jurnal.umat.ac.id/index.php/digibis>
- Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>